

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN)**

**Indri Dian Assari<sup>1</sup> Enita Binawati<sup>2</sup>**

[Indridian066@gmail.com](mailto:Indridian066@gmail.com)<sup>1</sup>, [enitabinawati@gmail.com](mailto:enitabinawati@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of the internal control system, regional financial accounting system and human resource capacity on the quality of local government financial reports in Sleman Regency. The population in this study is the subdivision of finance, accountants (bookkeepers) and treasurers (receipts and expenditures) of the Sleman Regency Regional Apparatus. This study used 118 respondents. Data were obtained by distributing questionnaires. Using quantitative descriptive analysis method. Data analysis used multiple linear regression with a significant level of 5%.*

*The results showed that, simultaneously, the variables of the internal control system, regional financial accounting system and human resource capacity had a significant positive effect on the of the quality of local government financial reports, as evidenced by the results of the simultaneous test (F test). Partially, the internal control system variables affect the quality performance of local government financial reports, and the regional financial accounting system variables and human resource capacity also affect the quality of local government financial reports, this is evidenced by the results of the partial test (t test).*

**Keywords: Internal Control System, Accounting System, and Human Resource Capacity**

**PENDAHULUAN**

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah data yang sudah diolah dalam ringkasan dari proses pencatatan yang berbentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelola keuangan dana publik baik dari pajak, restribusi atau transaksi lainnya selama satu anggaran (Mardiasmo, 2006). Upaya pertanggungjawaban pemerintah, dilakukan dengan menyampaikan pertanggungjawabannya berupa bentuk laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala dalam bentuk barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Wujud nyata transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan dari pemerintah daerah harus berkualitas, karena dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami (PP No.71 Tahun 2010). Indikator masing-masing sebagai berikut: (1) relevan dengan indikator memiliki umpan balik (*feedbackvalue*), memiliki manfaat prediktif (*peramalan*), tepat waktu dan lengkap; (2) andal merupakan indikator penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralis; (3) dibandingkan dengan indikator konsisten penerapan kebijakan akuntansi, informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya; (4) dipahami dengan indikator bentuk dan istilah informasi laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Tujuan diperlakukannya hal tersebut agar lebih *accountable* dan semakin meningkatkan dalam kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2011 sampai 2021 ([bpkp.go.id](http://bpkp.go.id)). Merupakan WTP ke 10 kali yang diraih Pemkab Sleman secara berturut-turut. BPK menilai, selama 10 tahun terakhir Pemkab Sleman mampu mengelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Opini kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria (a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian internal; (c) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah; (d) pengungkapan yang cukup. Menurut Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo keberhasilan Pemkab Sleman memperoleh opini WTP tidak lepas dari peran penting BPK dalam membina sehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). ([harianjogja.com](http://harianjogja.com))/jogapolitan).

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi struktur organisasi dalam suatu perusahaan sebagai alat yang dikoordinasi dalam menjaga kekayaan organisasi, memeriksa dan mengecek data akuntansi keuangan, serta menjaga kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian intern adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain dalam memberi jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efisiensi dan efektifitas operasi, kendala laporan keuangan, dan kepatuhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan berlaku (Mulyadi, 2013:163). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Untuk itu, dengan adanya sistem

pengendalian intren yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Untary & Ardiyanto, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3), mengemukakan sistem akuntansi pemerintah daerah dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan keuangan dalam rangka tanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Setiap entitas laporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional yang dikenal dengan *International Accounting Standar Board* (IASB) untuk sekarang menyebutnya dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS) yang merupakan prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di dalam sebuah perusahaan (Nugraheni & Subaweh, 2008).

Anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena peran penting pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan optimalisasi dan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah (Siswadhi, 2017). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan membuat laporan keuangan serta memperlihatkan sebagai bukti sikap pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam Tujuan SAP adalah sebagai bentuk pendoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan dasar hukum yang dimulai dari UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negaraoisampai PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lyna & Sabeni, 2007).

Sistem akuntansi keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) pada periode tertentu, karena dalam mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Kapasitas SDM merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang didukung latar belakang pendidikan. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami logika akuntansi disebabkan sumber daya manusia tidak dibekali dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bidang keuangan, hal ini menimbulkan dampak kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian dengan laporan standar yang ditetapkan pemerintah (Yosefrinaldi, 2013).

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pernah diteliti oleh

beberapa peneliti sebelumnya di Indonesia, yaitu Hanifa, Lia dkk (2016) meneliti dengan judul Pengaruh Kompetensi Penggelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa hasil penelitiannya berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Dalam artian semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Mamahit, Sondakh dan Ilat (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah menyatakan bahwa hasil penelitian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laporan keuangan daerah di daerah kabupaten Minahasa Selatan. Tetapi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tiap-tiap SKPD Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menguji variabel Sistem Pengendalian Intern, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Untuk menguji pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah tararf suatu laporan yang dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan serta memberikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, transaksi-transaksi, realisasi anggaran arus dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode.

Adapun komponen LKPD Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas LKPD yaitu:

1. Relevan. Laporan keuangan bisa relevan bila suatu informasi telah dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu untuk mengevaluasi suatu peristiwa masa, masa kini dan memprediksi masa yang akan datang serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat Dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan pelaporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan eksternal dilakukan jika entitas diperbandingkan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
4. Dapat Dipahami. Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses integral pada suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun Indikator yang digunakan dalam mengukur SPI menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan

Tujuan Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2013:163) adalah

1. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
2. Mendorong efisiensi
3. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
4. Menjaga kekayaan organisasi

---

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Halim, (2012:35) menjelaskan akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang melakukan.

Menurut Kepmendagri No.13 Tahun 2006 (2006:76), Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) meliputi; pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Sistem akuntansi adalah faktor utama pendorong manajemen perusahaan dalam menghasilkan informasi yang berstruktur, menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sistem berbagai basis/dasar akuntansi Darmawati (2017), antara lain:

1. Basis Kas. Basis kas (*cash basis*), menetapkan bahwa sebuah transaksi ekonomi yang dilakukan jika transaksi menimbulkan perubahan pada kas. Maka transaksi ini belum menimbulkan pada kas, transaksi tersebut tidak perlu dicatat.
2. Basis Akrual. Basis Akrual (*accrual basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode berikutnya.
3. Basis kas Modifikasi. Basis kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*) adalah dengan menambah batasan periode waktu tertentu di luar periode pelaporan untuk pengakuan penerimaan dan pengeluaran kas.
4. Basis Akrual Modifikasi. Basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*) adalah memodifikasi basis akrual, yaitu kebalikan dari basis kas modifikasi yang artinya mengurangi cakupan fokus pengukuran basisakrual.

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Primayana, Atmadja dan Darmawan (2004) pengertian Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dalam diri manusia yang meliputi pada tingkat pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang memadai dari manusia dalam menyelesaikan tugas maupun tanggungjawaban yang sudah diberikan kepadanya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menurut Griffin (2004) Kapasitas SumberDaya Manusia dapat diukur melalui:

1. Pendidikan, Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dan proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu;
  - a. Pendidikan Formal, merupakan pendidikan yang dilakukan di sekolah pada umumnya, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
  - b. Pendidikan Informal, merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
  - c. Pendidikan Nonformal, merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

2. Pelatihan, Pelatihan yang baik, berkaitan dengan keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Pelatihan adalah usaha dalam memperbaiki performa pekerja yang sedang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pengalaman, Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Seseorang yang mengalami pengalaman yang akan akan terbiasa melakukan sesuatu dan mempunyai wawasan yang luas.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem Pengendalian Intern menurut PP No 60 Tahun 2008 adalah proses yang dirancang oleh manajemen dalam membantu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamat asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (fraud).

Sistem pengendalian intern suatu organisasi rendah, maka akan lebih terjadi kesalahan, kecurangan atau ketidak akuratan dalam penyajian laporan keuangan. Adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang tinggi dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan penyajian laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Elvin (2017).

H1: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Setiap entitas membuat laporan keuangan berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasionala dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB) yang sekarang disebut *International Financial Reporting Standar* (IFRS) sebagai prasyarat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu pada standar yang sudah berlaku (Nugraheni & Subaweh, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mokoginta, dkk (2017) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa bagian akuntansi atau keuangan yang berada di BPAKD sudah memahami prosedur akuntansi sampai dengan menjadi laporan keuangan yang baik.

H2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas**

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Griffin (2004) menyatakan bahwa sumber daya manusia dapat diukur melalui tanggung jawab, pelatihan dan tingkat pengalaman. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian pada bidang akuntansi.

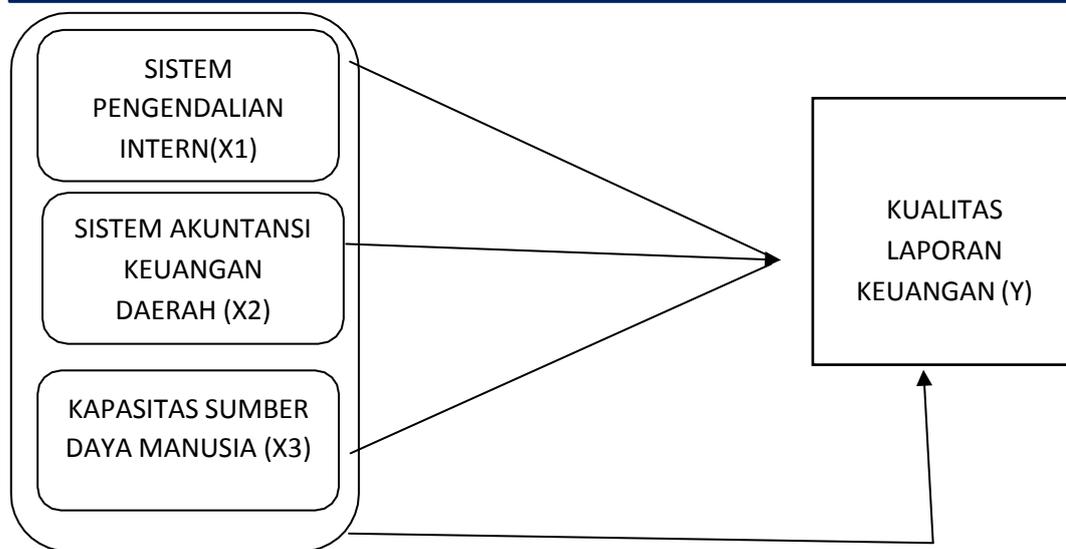
Sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak keahliannya di bidangnya, maka menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan fungsi akuntansi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi rendah (Elvin,2017). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tinggi, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan, sehingga semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode.

H4: Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



**Gambar 1. Model Penelitian**

## **METODA PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub bagian Keuangan, Akutan (pembuku), dan Bendahara (penerima dan pengeluaran) di SKPD Kabupaten Sleman. Jumlah populasi dan sampel pegawai yang akan menjadi subjek penelitian sebanyak 26 SKPD di Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, dimana sampel akan dipilih berdasarkan pertimbangan atau karakteristik yang telah ditentukan akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

### **Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan data metode survai yang menggunakan kuesioner yaitu data primer. Data primer disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara, yaitu dengan cara mengirimkan atau menyebar kuesioner yang telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden SKPD di Kabupaten Sleman.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan responden SKPD di Kabupaten Sleman agar memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis.

### **Rancangan Analisis Data**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali,2013). Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Uji validitas digunakan dengan metode *pearson correlation* yaitu dengan cara

---

menghitung kolerasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Apabila kolerasi antar skor pertanyaan dengan skor antara 0,01 dan 0,05, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid atau sah.

#### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu pengukuran dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya dan dapat dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto, 2004). Dalam hal ini SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik dengan *Cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Menurut Ghozali (2013), suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach alpha*  $> 0,70$ .

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

#### Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas ini berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau variabel penjelas. Apabila Sebagian atau seluruh variabel independent berkolerasi kuat, maka terjadi multikolinearitas. Konsekuensi terjadinya multikolinearitas adalah koefisien korelasi variabel tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar atau tidak terhitung.

Untuk mendeteksinya maka dalam penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi bebas dari multikolinearitas apabila nilai variance dan VIF di sekitar nilai 1. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai VIF kurang dari 10 maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak terdapat multikolinearitas dan jika nilai VIF lebih dari 10 maka  $H_0$  ditolak berate terdapat multikolinearitas

#### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, artinya varian-varian dalam model tidak sama. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar walaupun yang diperoleh menggambarkan populasinya dalam arti tidak bisa. Bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Hal ini disebabkan oleh varian yang tidak efisien. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 5% maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan jika probabilitas kurang dari 0,05 atau 5% maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari Uji tersebut terdapat  $\alpha$  sebesar 0,05 atau 5%.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL).

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji t**

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara persial. Untuk menentukan nilai t-statistik tabel digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%,  $df = (n-k)$  dan  $(k-1)$  dimana n adalah jumlah observasi, kriteria uji yang digunakan adalah: Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, sedangkan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

#### **Uji Simultan (F)**

Uji F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independent secara barsama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Untuk menentukan niali F-tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 atau 5% dengan  $df = (n-k)$  dan  $(k-1)$  dimana n adalah jumlah observasi, kriteria uji yang digunakan adalah: Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, sedangkan nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

**HASIL PENELITIAN****Deskripsi Sampel Penelitian****Tabel 1. Penyebaran dan pengembalian kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Kuesioner yang di sebar ke pegawai SKPKabupaten Sleman	125	100%
Kuesioner yang tidak Kembali	7	5,60
Jumlah Sampel Penelitian	118	94,40

**Deskripsi responden****Tabel 2. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Pria	40	33,9
Wanita	78	66,1
Total	118	100

**Tabel 3. Karakteristik Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase (%)
20-30 Tahun	33	28,0
31-40 Tahun	20	16,9
41-50 Tahun	45	38,1
> 50 Tahun	20	16,9
Total	118	100

**Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA/SMK	23	19,5
D1	1	0,8
D3	24	20,3
D4	1	0,8
S1	56	47,5
S2	13	11,0
Total	118	100

**Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang**

Latar Belakang	Jumlah	Persentase (%)
Pendidikan Ekonomi	2	1,7
Akuntansi	37	31,4
Manajemen	15	12,7
MIPA	2	1,7
Administrasi Publik	1	0,8
Hukum	1	0,8
Pertanian	2	1,7
Lain-Lain	58	49,2

Total	118	100
-------	-----	-----

**Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
< 1 Tahun	14	11,9
1-5 Tahun	37	31,4
> 5 Tahun	67	56,8
Total	118	100

**Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Keterlibatan Laporan Keuangan**

Keterlibatan LK	Jumlah	Persentase (%)
Iya	91	77,1
Tidak	27	22,9
Total	118	100

**Hasil Pengujian Data**

Uji Validitas

**Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas**

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,845	0,179	Valid
	Y2	0,813	0,179	Valid
	Y3	0,857	0,179	Valid
	Y4	0,871	0,179	Valid
	Y5	0,831	0,179	Valid
	Y6	0,763	0,179	Valid
	Y7	0,878	0,179	Valid
	Y8	0,863	0,179	Valid
	Y9	0,883	0,179	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X1)	X1.1	0,872	0,179	Valid
	X1.2	0,853	0,179	Valid
	X1.3	0,837	0,179	Valid
	X1.4	0,874	0,179	Valid
	X1.5	0,836	0,179	Valid
	X1.6	0,846	0,179	Valid
	X1.7	0,846	0,179	Valid
	X1.8	0,883	0,179	Valid
	X1.9	0,736	0,179	Valid
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	X2.1	0,773	0,179	Valid
	X2.2	0,816	0,179	Valid
	X2.3	0,831	0,179	Valid
	X2.4	0,818	0,179	Valid
	X2.5	0,694	0,179	Valid
	X2.6	0,718	0,179	Valid
	X2.7	0,766	0,179	Valid
	X2.8	0,852	0,179	Valid
	X2.9	0,875	0,179	Valid

	X2.10	0,830	0,179	Valid
	X2.11	0,808	0,179	Valid
	X2.12	0,825	0,179	Valid
	X2.13	0,867	0,179	Valid
	X2.14	0,837	0,179	Valid
	X2.15	0,797	0,179	Valid
	X2.16	0,782	0,179	Valid
	X2.17	0,840	0,179	Valid
	X2.18	0,782	0,179	Valid
	X2.19	0,856	0,179	Valid
	X2.20	0,859	0,179	Valid
	X2.21	0,801	0,179	Valid
	X2.22	0,811	0,179	Valid
	X2.23	0,862	0,179	Valid
	X2.24	0,847	0,179	Valid
	X2.25	0,841	0,179	Valid
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3)	X3.1	0,698	0,179	Valid
	X3.2	0,838	0,179	Valid
	X3.3	0,874	0,179	Valid
	X3.4	0,888	0,179	Valid
	X3.5	0,821	0,179	Valid
	X3.6	0,819	0,179	Valid
	X3.7	0,824	0,179	Valid
	X3.8	0,819	0,179	Valid
	X3.9	0,747	0,179	Valid

Dari tabel hasil pengujian validitas di atas, dapat diketahui bahwa pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner mengenai kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah daerah dan kapasitas sumber daya manusia memiliki r-hitung lebih besar dari r-tabel yang sebesar 0,179. Oleh karena itu pernyataan dalam kuesioner mengenai kualitas laporan keuangan daerah sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah daerah dan kapasitas sumber daya manusia yang terdapat dalam kuesioner dapat dikatakan valid.

#### Uji Reliabilitas

**Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	0,950	0,6	Reliable
Sistem Pengendalian Intern(X1)	0,949	0,6	Reliable
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Daerah (X2)	0,979	0,6	Reliable
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3)	0,931	0,6	Reliable

Dari tabel di atas dapat diketahui hasil pengujian realibilitas untuk instrument yang ada dalam kuesioner mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah memiliki nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) yang lebih besar dari 0,6 dengan demikian item-item pernyataan dalam kuesioner mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah bisa dikatakan reliable atau andal.

**Uji Asumsi Klasik**

Uji Normalitas

**Tabel 10. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		118
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,72655434
	Absolute	,098
Most Extreme Differences	Positive	,077
	Negative	-,098
Kolmogorov-Smirnov Z		1,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,211

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel uji normalitas, bisa kita lihat bahwa nilai dari *Kolmogorov-Smirnov Sig (2- tailed)* dari penelitian ini sebesar 0,211. Nilai *Kolmogorov-Smirnov Sig* yang sebesar 0,211, mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05, sehingga data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

**Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	Niai VIF	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern	0,350	2,853	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,368	2,715	Tidak terjadi multikolinieritas
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,720	1,389	Tidak terjadi multikolinieritas

Dari tabel uji *multikolinieritas* maka dapat kita ketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 dan juga mempunyai nilai VIF kurang dari 10. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa keempat variabel independen tersebut tidak ada unsur terjadinya multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Variabel penelitian dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai absolute residual lebih dari 5% atau 0,05.

**Tabel 12. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig	A	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern	0,745	0,05	Tidak terdapat heterokedastisitas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,875	0,05	Tidak terdapat heterokedastisitas
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,887	0,05	Tidak terdapat heterokedastisitas

Uji Autokorelasi

**Tabel 13. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.826 <sup>a</sup>	.683	.674	2,762	1.888

a. Predictors: (Constant), Kapasitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat jika nilai Durbin Watson sebesar 1.888, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 118 (n) dan jumlah variabel independen (k=4), maka didapat nilai dU sebesar 1.7364. oleh karena nilai DW 1.888 lebih besar dari batas atas (du) 1.7364 dan kurang dari 4 – 1.7364 (4 - du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Hipotesis	Koefisien Regresi	Probabilitas (sig)	Keterangan
Konstanta		1,694	0,346	
Sistem Pengendalian Intern	H1	0,394	0,000	Signifikan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	H2	0,167	0,000	Signifikan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	H3	0,117	0,041	Signifikan
F		81,782	0,000	
R Square		0,683		
Adjusted R Square		0,674		

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka diperoleh persamaan regresi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = 1,694 + 0,394X_1 + 0,167X_2 + 0,117X_3 + e$$

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 15. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,694	1,789		,947	0,346
Sistem Pengendalian Intern	0,394	0,094	0,374	4,201	0,000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,167	0,035	0,420	4,829	0,000
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,117	0,057	0,128	2,066	0,041

Hasil bahwa nilai signifikansi variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,041 yang berarti lebih kecil dari  $< 0.05$ . hal ini dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 16. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1871,914	3	623,971	81,782	,000 <sup>b</sup>
Residual	869,790	114	7,630		
Total	2741,703	117			

Hasil bahwa nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari  $< 0,05$ . Hal ini dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Uji Koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,826 <sup>a</sup>	,683	,674	2,762

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,674, nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 67,4% dan sisanya sebesar 32,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar regresi.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil uji statistik t di peroleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari  $< 0,05$ . Hal ini dapat disimpulkan  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, hal ini dikarenakan Adanya sistem pengendalian inter pemerintah yang tinggi dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan penyajian laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Elvin: 2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Mokoginta, Linda dan Pontoh (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitaslaporan keuangan daerah.

#### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil uji statistik t di peroleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari  $< 0,05$ . Hal ini dapat disimpulkan  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya reformasi atau pembaharuan didalam sistem pertanggung jawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien, maka untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah. Diharapkan pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggung jawaban keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Novtania, 2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Hanifah, Wawo dan Husein (2016) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil uji statistik t di peroleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,041 yang berarti lebih kecil dari  $< 0,05$ . Hal ini dapat disimpulkan  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil ini ternyata menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan

---

Keuangan Daerah. Sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak keahliannya di bidangnya, maka menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan fungsi akuntansi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi rendah (Elvin, 2017). Penelitian ini juga didukung oleh Mamahit, Sondakh, dan Ilat (2017) yang menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel 4.19, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari  $< 0,05$ . Hal ini dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya bahwa Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini juga didukung oleh Pradono (2015) dan Defitri (2018) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Daerah, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

**KESIMPULAN**

1. Hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$ . Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Pradono (2015) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$ . Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Lia, Andi dan Husin (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa variabel Kapasitas Sumber

Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,041 yang berarti  $< 0,05$ . Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah terdukung. Penelitian ini juga didukung oleh Fernando, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4. Hasil analisis data secara simultan diperoleh bahwa variabel sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$ . dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah terdukung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Griffin. (2004). *Manajemen, Ahli Bahasa Gina Gania*. Jakarta: Erlangga.
- [https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/03/12/512/1065945/bpk-apresiasi-raihan-wtp-ke-10-sleman-Diakses Tanggal 12 Desember 2021](https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/03/12/512/1065945/bpk-apresiasi-raihan-wtp-ke-10-sleman-Diakses%20Tanggal%2012%20Desember%202021).
- Lia Hanifa, A. B. (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Progres Ekonomi Pembangunan, 1, Nomor 2*.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamahit Fenando Andreas Jullie J Sondakh, V. I. (n.d.). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pwnwrapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada SKSD Kabupaten Minahasa Selatan). *Universitas Sam Ratulangi, 75-85*.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novtania Mokoginta, L. L. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2)*, 874-890.

- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008, April). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13 (1), 48-58.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun. 2010. Diakses 12-12-2021. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-laporan-keuangan-pemerintah-daerah>.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun. 2010. Diakses 12-12-2021. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Primayana, A. d. (2004). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoarjo). *Jurnal Akuntansi Progam SI, Vol:2 No:1*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung:Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern